

Tinjauan masalah sebelum dan setelah pandemi: Analisis klinik akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jawa Timur

Adinda Mustarsida

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200502110133@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pandemi covid-19;
akuntansi; pengelolaan
keuangan

Keywords:

Pandemic covid-19;
accounting; financial

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tersebar hampir ke seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 ini memberikan efek yang cukup parah bagi masyarakat maupun pemerintah dan negara Indonesia termasuk permasalahan pengelolaan keuangan di daerah. Keadaan yang terjadi di UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka permasalahan mereka mengerucut kepada keuangan. Ada beberapa poin keluhan tentang bagaimana tata cara pembayaran yang pada saat itu tiba-tiba berubah menjadi online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah membatasi kita terhadap seluruh hal. Ada beberapa simpulan

permasalahan yang terjadi dan telah dikeluhkan ke pihak Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD. Permasalahan ini justru lebih banyak tentang pengelolaan keuangan yang mulai bermasalah. Tetapi pada saat pandemi Covid-19 yang paling bermasalah dalam kerusakannya adalah pengelolaan keuangan. Menemukan solusi yang tepat guna menstabilkan permasalahan pada konsultasi-konsultasi tertentu. Perubahan yang tampak pada jenis permasalahan yang ada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 mampu memberikan kita gambaran bahwa saat awal pandemi terjadi di Indonesia, terjadi revolusi yang mendadak. Perubahan yang terlalu cepat ini berkenaan dengan keuangan yang mana, setiap masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkontak fisik dengan orang asing.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has spread almost all over the world, one of which is Indonesia. The occurrence of the Covid-19 pandemic has had quite a severe effect on the people and the government and the Indonesian state. The situation that occurred at the UPT PPK BPKAD East Java Province, their problems narrowed to finances. There were a number of points of complaint about how payment procedures were at that time suddenly changed to online. As we know that the Covid-19 pandemic has limited us to all things. There are several conclusions about the problems that have occurred and have been complained to the UPT PPK BPKAD Consultation Clinic. This problem is actually more about financial management which is starting to have problems. But during the Covid-19 pandemic, the most problematic in terms of damage was financial management. Finding the right solution to stabilize the problem in certain consultations. The visible changes in the types of problems that existed during the Covid-19 pandemic and after the Covid-19 pandemic are able to give us an idea that when the pandemic started in Indonesia, there was a sudden revolution. This change is too fast with regard to finance, where every community is not allowed to have physical contact with strangers.

Pendahuluan

Sudah tiga tahun berlalu, pandemi Covid-19 telah mereda dan bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada. Apabila ditarik masa lalu, sekitar tahun akhir 2019 dan awal 2020 adalah permulaan hancurnya dunia. Saat itu, terdapat satu ancaman yang tiba-tiba datang

dan tidak dapat dikendalikan dengan cepat. Ancaman tersebut datang dari Kota Wuhan, isu yang hingga kini masih terdengar adalah karena adanya virus yang tersebar melalui jenis makanan yang dimakan. Sebenarnya, penyebab dari datangnya virus masih tersebar simpang siur dan memiliki banyak teori konspirasi yang hampir dipercayai seluruh dunia. Namun, apabila dilihat dari logika kesehatan, virus corona ada karena adanya infeksi yang terjadi pada coronavirus atau Covid-19. Sadar atau tidak sadar, virus ini dapat menyebar karena adanya air liur yang mudah menyentuh tubuh kita.

Pandemi ini tersebar hampir ke seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19 ini memberikan efek yang cukup parah bagi masyarakat maupun pemerintah dan negara Indonesia. Seluruh aspek terhantam tanpa ada persiapan yang cukup matang. Bahkan pada tahun 2002, Worldmeter memberikan laporan bahwa di antara seluruh negara yang terkena pandemi Covid-19, Indonesia ‘berhasil’ mendapatkan ranking 32 apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang masih berada di peringkat pertama dengan kasus paling tinggi (Hanifa & Fisabilillah, 2021).

Gambar 1. 1 Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia



Gambar 1. Data Jumlah Penduduk Terpapar Covid-19 di Indonesia Tahun 2020

Sumber: BNPB 2019

Perlu diketahui bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia mulai masuk dan tersebar sekitar awal hingga pertengahan bulan Maret. Saat itu, ada satu orang pasien dari Kota Depok yang pulang dari luar negeri dan membawa virus Covid-19 tersebut. Sejak saat itu, masyarakat mulai resah, namun pemerintah sedikit menganggap ringan permasalahan tersebut. Dapat dilihat pada data yang dimiliki oleh BNPB pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Ini berarti pandemi telah berjalan kurang lebih dua bulan. Dalam waktu tersebut, jumlah penduduk Indonesia yang terpapar telah mencapai angka 17 ribu. Dengan angka tersebut, WHO memberikan himbauan penting dengan menetapkan kebijakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan bagi seluruh pasien serta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pandemi menjadi mimpi buruk seluruh orang, tidak ada kehidupan yang meriah lagi sejak terjadinya pandemi. Munculnya, memberikan dampak besar bagi seluruh masyarakat

di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi (Minai et al., 2021; Sarif et al., 2023). Sektor perekonomian hampir tidak dapat diselamatkan apabila saat itu pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat. Pada saat kejadian seperti ini, pemerintah adalah satu-satunya komponen yang dapat dipercaya oleh masyarakat selain media. Pemerintah memegang kendali penuh terhadap apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya demi kesejahteraan bersama.

Pemerintah pada saat itu dengan segera menentukan peran dan kebijakan yang mampu menyelimuti masalah pandemi Covid-19. Apapun yang akan dilakukan oleh penduduk negara Indonesia, hal itu harus terlihat efektif. Hal ini berlaku juga bagi setiap peran dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya adalah aspek perekonomian yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, yakni UPT PPK BPKAD. Mereka merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Secara sederhana UPT PPK BPAKD memiliki tugas pokok seperti menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang keuangan, serta melakukan tugas lainnya dengan kebijakan yang telah disesuaikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa pemerintah memiliki dampak nyata atas adanya pandemi Covid-19 ini, menjadikannya tempat berkumpul banyaknya masalah. Hal ini juga terjadi pada UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur. Permasalahan ini terjadi pada saat pandemi Covid-19 masih terjadi. Apabila disimpulkan secara sederhana, permasalahan yang datang saat pandemi Covid-19 bukanlah suatu hal yang parah. Kemungkinan, hal ini memang menjadi wajar mengingat masa yang terjadi. Dapat dilihat di bawah ini, terdapat data tentang permasalahan yang terjadi di UPT PPK BPAKD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Tatap Muka di Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD

No.	Waktu	Instansi	Pokok Konsultasi
1.	09/01/2018	UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengelolaan keuangan terkait anggaran dan pendapatan asli daerah
2.	17/09/2018	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Verifikasi kegiatan bidang yang lintas instansi kab/kota
3.	29/10/2018	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Perjalanan dinas ke Luar Negeri
4.	29/01/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Sistem/ tata cara pembayaran dengan program non tunai dalam peng SPJ an
5.	06/03/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Permasalahan pembayaran non tunai perjalanan dinas, terutama dalam sewa kendaraan
6.	06/03/2019	Dinas PU SDA Prov. Jatim	Panjar SPPD untuk diaplikasikan ke Sibaku dan Pajak rental SPPD

7.	30/04/2019	UPT Lab DLH Pov. Jatim	SPJ bantuan transport yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari
8.	18/06/2019	DPRD Kab. Pamekasan	Peran pengawasan legeslatif terhadap belanja langsung yang dilakukan dengan swakelola
9.	20/06/2019	BPKAD Jombang	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan
10.	03/07/2019	BKD Kota Batu	konsultasi terkait informasi pelatihan pengelolaan keuangan
11.	02/10/2019	Bakorwil Malang	Prosedur dan kelengkapan administrasi SPJ pengadaan barang dan jasa
12.	10/10/2019	DPPPAK Prov. Jatim	Rencana penyusunan prosedur penatausahaan keuangan pada DP3AK
13.	20/11/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Pengadaan hibah/bansos
14.	21/11/2019	BPKAD Sumenep	Pengelolaan keuangan terbaru sesuai PP 12/2019
15.	04/12/2019	Dinas ESDM Prov. Jatim	Tata cara pencairan tentang pekerjaan/pengadaan Kajian (sistem pembayaran)
16.	17/12/2019	Dinkes PPKB Trenggalek	Rencana program pendampingan
17.	23/12/2019	BPKAD Sumenep	Penggalian rencana pendampingan
18.	30/12/2019	DPPPAK Prov. Jatim	Penatausahaan sisa dana UP, GU, TU (sisa mati)
19.	20/02/2020	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro	Kurangnya pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan

Sumber: Data Sekunder dari UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur

Dengan melihat keadaan yang terjadi di UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka permasalahan mereka mengerucut kepada keuangan. Ada beberapa poin keluhan tentang bagaimana tata cara pembayaran yang pada saat itu tiba-tiba berubah menjadi online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 telah membatasi kita terhadap seluruh

hal. Sehingga, alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pelan-pelan juga turut berubah. Pandemi Covid-19 ini sekaligus membawa modernisasi bagi hampir seluruh lapisan masyarakat. Ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam peran pemerintah yang dijelaskan oleh Musgrave (1984) bahwa pemerintah memiliki peran alokasi, peran distribusi serta peran stabilisasi. Dengan melihat permasalahan yang dimiliki oleh UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka kita mengetahui bahwa masih terdapat celah yang belum tepat dalam pemerintahan, terutama pemerintah daerah.

Pembahasan

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Suatu negara, memiliki keperluan yang penting dalam mengatur setiap keuangannya. Dalam satu negara, seperti negara Indonesia, keuangan sangat riskan apabila tidak ada badannya tersendiri dalam mengatur. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang luas dengan 17 ribu lebih pulau tersebar dari ujung sabang hingga ujung merauke. Pengaturan keuangan ini cukup memakan waktu dan tenaga bagi pemerintah pusat apabila hanya dikerjakan satu instansi. Tentunya hal ini juga tidak akan terjadi keefektifan karena jangkauannya terlalu luas. Dengan demikian, dibentuklah satu unit di daerah yakni Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang disingkat sebagai UPT PPK BPKAD.

Masyarakat selalu menginginkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat mampu mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga, masyarakat juga menuntut balik terhadap pemerintah agar memiliki pemerintahan yang baik atau *good government governance*. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa pusat melakukan dorongan terhadap akuntabilitas politik. Wajib bagi pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat di Indonesia. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan setiap program atau rencana yang mereka laksanakan.

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang menjelaskan tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta, terdapat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah cakupannya sangat luas baik dari Kabupaten maupun Kota. Mereka dipercayakan untuk membangun serta mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, serta kemasyarakatan (Nursanti, n.d.)

Pembentukan UPT BPKAD di Provinsi Jawa Timur juga termasuk dalam upaya pemerintah bagi melaksanakan kewajibannya. Pengelolaan keuangan perlu diperhatikan, mengingat bahwa negara Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki ratusan juta penduduk dan memiliki banyak aset penting yang perlu dijaga di setiap daerahnya. Adapaun beberapa tugas pokok yang dilakukan oleh BPKAD Jawa Timur sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Penyusunan rancangan APBD
2. Perubahan APBD
3. Penetapan APBD

4. Pelaksanaan APBD
5. Penatausahaan APBD
6. Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah
7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Pembinaan administrasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
9. Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pembentukan UPT BPKAD ini sesuai dengan tugas yang telah dirincikan sebelumnya, namun juga terdapat fungsinya tersendiri yang menjelaskan. Badan pemerintah sudah seharusnya dibentuk bukan tanpa alasan. Sekecil apapun alasannya, pasti tetap memiliki latar belakang yang khusus. Guna menyesuaikan dengan alasan pembentukannya, maka dapat diketahui ada beberapa fungsi dari UPT BPAKD yang mendukung terlaksananya tugas yang telah disesuaikan dengan kebijakan, yaitu:

1. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD
2. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
3. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
4. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
5. Pelaksanaan penetapan Surat Penyedia Dana (SPD)
6. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
8. Pemrosesan usulan penunjukkan pengelola Keuangan Daerah
9. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas
10. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
11. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
12. Pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhituang Fihak Ketiga (PFK)
13. Pelaksanaan restitusi atau pengembalian kelebihan pendapatan
14. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah
15. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah
16. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
17. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset daerah
18. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota
19. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten atau Kota
20. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah
21. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
22. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah
23. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD
24. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dengan fungsi tersebut, BPKAD seharusnya telah memenuhi setiap permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang terjadi di daerah. Karena pada dasarnya, pembentukan lembaga pemerintah daerah berarti pemerintah pusat tidak lagi mengikuti atau mengurus rumah tangga dari pemerintahan daerah. Namun, ada beberapa kecuali

apabila terdapat permasalahan yang besar dan tidak mampu untuk diatasi oleh daerah, maka pusat akan turun tangan secara langsung. Namun, dengan adanya pembentukan BPKAD ini, yang terjadi saat pandemi Covid-19 justru datang banyak permasalahan.

Ada beberapa simpulan permasalahan yang terjadi dan telah dikeluhkan ke pihak Klinik Konsultasi UPT PPK BPKAD. Permasalahan ini justru lebih banyak tentang pengelolaan keuangan yang mulai bermasalah. Tetapi pada saat pandemi Covid-19 yang paling bermasalah dalam kerusakannya adalah pengelolaan keuangan. Ini terjadi karena sebagian masyarakat Indonesia tidak mempersiapkan diri atas keuangan dan aset mereka. Yang terjadi adalah mereka hampir mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Namun, dalam ranah pemerintahan ini adalah hal yang berbeda, berikut di bawah merupakan poin-poin masalah yang telah disimpulkan:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan yang dilihat dari beberapa komponen seperti, sumber daya manusia, perbandingan anggaran, serta jalannya konsultasi pelatihan.
2. Tata cara dalam transaksi non tunai atau transaksi online yang dilakukan saat perjalanan dinas, yang terhitung dalam bentuk tiket, sewa kendaraan atau transport, dan lainnya.
3. Tata cara dalam transaksi non tunai dan sistemnya dalam aspek pembayaran SPJ.

Dengan demikian, telah ditemukan tiga pokok permasalahan yang terjadi dalam catatan konsultasi UPT BPKAD. Permasalahan tersebut, selanjutnya di bawa ke meja rapat untuk dirundingkan dan disepakati dalam urusan penyelesaiannya. Hal ini nantinya berkaitan dengan elemen atau komponen lain yang penting maupun tidak penting. Perlu juga untuk dipahami bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pihak. Dalam hal ini adalah pemerintah dan jajarannya yang berfungsi secara langsung dengan permasalahan atau UPT BPKAD itu sendiri.

Solusi Terhadap 3 Poin Masalah Saat Pandemi Covid-19

Pada setiap permasalahan yang selalu diinginkan adalah solusi yang tepat. Hal ini juga terjadi pada permasalahan yang hadir pada saat pandemi Covid-19. Konsultasi Akuntansi menerima tiga poin masalah yang dilaporkan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Mereka datang dari beberapa instansi, namun memiliki permasalahan yang sama. Dengan demikian, terdapat beberapa solusi yang perlu dilakukan dan diterapkan sehingga dapat dilihat hasil yang nantinya menjadi bentuk dari evaluasi kepada seluruh pihak.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Yang Dilihat Dari Beberapa Komponen Seperti, Sumber Daya Manusia, Perbandingan Anggaran, Serta Jalannya Konsultasi Pelatihan

Jika ada kekurangan dalam pengetahuan atau keterampilan, pertimbangkan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada anggota tim akuntansi agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang praktik akuntansi terbaru dan efektif. Memastikan tugas dan tanggung jawab dalam tim akuntansi didistribusikan secara adil dan sejalan dengan keahlian masing-masing anggota. Lakukan analisis pembelanjaan secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi perbedaan atau inefisiensi (Kurniawati, 2023). Bandingkan anggaran aktual dengan anggaran yang disetujui dan identifikasi perbedaan yang signifikan. Ini membantu dalam mengambil tindakan koreksi jika diperlukan.

Pastikan konsultasi pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tim akuntansi dan pihak-pihak terkait. Pastikan materi pelatihan relevan secara langsung dengan tantangan manajemen keuangan yang dihadapi tim akuntansi. Gunakan contoh kasus kehidupan nyata untuk memperkuat pemahaman dan penerapan praktis dari konsep yang diajarkan. Membangun sistem pemantauan berkala untuk memantau kemajuan pengelolaan keuangan dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Berikan kesempatan kepada tim akuntansi untuk memberikan umpan balik tentang proses konsultasi pelatihan dan apakah solusi yang diusulkan telah bermanfaat.

Tata Cara Dalam Transaksi Non Tunai Atau Transaksi Online Yang Dilakukan Saat Perjalanan Dinas, Yang Terhitung Dalam Bentuk Tiket, Sewa Kendaraan Atau Transport, Dan Lainnya

Dalam mengatasi permasalahan terkait tata cara dalam transaksi non tunai atau transaksi online selama perjalanan dinas, terutama terkait dengan pembelian tiket, sewa kendaraan, atau transportasi lainnya, konsultasi akuntansi dapat memberikan beberapa solusi sederhana. Pertimbangkan untuk menawarkan kartu kredit bisnis kepada karyawan yang sering bepergian. Hal ini akan memudahkan mereka melakukan pembayaran nontunai tanpa menggunakan modal pribadi. Memberikan petunjuk tertulis mengenai tata cara transaksi nonmoneter selama perjalanan dinas. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, prosedur pengajuan, dan batasan anggaran untuk setiap jenis transaksi.

Disarankan menggunakan aplikasi pembayaran atau dompet digital yang dapat dikaitkan dengan anggaran perjalanan resmi. Pastikan karyawan mengetahui cara menggunakan aplikasi dengan benar. Ingatkan karyawan untuk selalu menyimpan bukti pembayaran, seperti kwitansi atau email konfirmasi. Dokumen ini akan penting untuk tujuan pelacakan dan rekonsiliasi di masa depan. Minta staf untuk memberikan rincian pengeluaran secara lengkap dan akurat, termasuk rincian transaksi, tujuan perjalanan, dan penerima. Tetapkan sistem pemantauan dan rekonsiliasi reguler untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Atur pelatihan staf tentang cara melakukan transaksi non-tunai dengan benar dan pentingnya menyimpan bukti pembayaran dan memerinci biaya. Tetapkan batasan atau aturan untuk jenis transaksi tertentu, seperti persewaan mobil atau akomodasi. Pastikan karyawan menghormati pembatasan ini. Mintalah saran dari staf yang melakukan transaksi non-tunai. Jika ada masalah atau kendala, segera perbaiki dan perbaiki prosesnya. Mengadakan konsultasi rutin dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan pariwisata resmi dan transaksi non-moneter. Ini akan membantu untuk lebih memahami proses dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul.

Tata Cara Dalam Transaksi Non Tunai Dan Sistemnya Dalam Aspek Pembayaran SPJ

Implementasikan sistem pengajuan SPJ secara elektronik. Ini memungkinkan staf yang melakukan perjalanan dinas untuk mengajukan SPJ secara online dan mengunggah dokumen pendukung, seperti tiket atau bukti pembayaran. Dalam sistem pembayaran, pastikan bahwa setiap transaksi atau item dalam SPJ memiliki kode anggaran yang jelas dan akurat. Ini akan membantu dalam pelacakan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tetapkan kebijakan penyimpanan bukti pembayaran elektronik dalam format yang mudah diakses dan dicari, sehingga memudahkan proses audit dan rekonsiliasi.

Implementasikan sistem persetujuan SPJ secara elektronik, di mana atasan langsung dapat memberikan persetujuan melalui platform elektronik. Hal ini menghindari penundaan dan kebingungan dalam proses persetujuan manual. Secara berkala melakukan pemantauan transaksi untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan sesuai anggaran. Memberikan pelatihan kepada pegawai terkait tentang cara penggunaan sistem pembayaran SPJ dan pengarsipan elektronik. Pastikan semua orang yang terlibat memahami cara kerja sistem ini. Pastikan adanya pemisahan tugas yang memadai dalam proses pengajuan, persetujuan, dan pembayaran SPJ untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Konsultasi Akuntansi UPT PPK BPKAD Pasca Pandemi

Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan yang terjadi pada saat pandemi. Namun, tahun ini pandemi telah menghilang meskipun dilihat dari berita belum 100 persen terhapuskan. Dengan berhentinya pandemi Covid-19, maka permasalahan yang datang pasti akan lebih variatif kembali. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah yang merincikan hasil konsultasi akuntansi dengan beberapa instansi.

Tabel 1. 2 Data Kunjungan Tatap Muka di Klinik Konsultasi Akuntansi UPT PPK BPKAD Sesudah Pandemi Covid-19

No.	Waktu	Instansi	Pokok Konsultasi
1.	23/03/2022	Disnakertrans Prov. Jatim	Program Pendampingan IP-ASN
2.	09/06/2022	BPKAD Kab. Nganjuk	Rencana fasilitasi Bimtek Pengelolaan BMD TA 2022
3.	21/07/2022	SMKN 1 Pungging	Dokumen SMK calon BLUD
4.	27/07/2022	Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim	Permohonan menjadi peserta tematik penatausahaan keuangan & konsultasi terkait penatausahaan keuangan
5.	05/10/2022	DP3AK	Konsultasi SK dan Teknis
6.	10/11/2022	BPKAD Kab. Situbondo	Bimtek terkait perpres 33 tahun 2020, kepmendagri 050-5889 tahun 2021, permendagri 84 tahun 2022
7.	23/03/2022	Disnakertrans Prov. Jatim	Program Pendampingan IP-ASN
9.	23/11/2022	Biro Perekonomian	Konsultasi terkait pengelolaan BLUD
9.	23/11/2022	BPKAD Kab. Blitar	Investasi Permanen
10.	20/12/2022	SMKN 4 Malang	Bimbingan & Konsultasi BLUD

11.	20/01/2023	DP3AK	Penyusunan SK honorarium pengelolaan keuangan TA 2023
12.	27/01/2023	DPU SDA Prov. Jatim	Konsultasi & komunikasi terkait persiapan pelaksanaan bimtek dengan tema penatausahaan keuangan daerah TA 2023
13.	16/02/2023	Dinas Peternakan Prov. Jatim	Aplikasi SIPD, bentuk & cara penguploadan TBP, penggunaan NPD, & penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja barang jasa
14.	03/04/2023	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	Pelaksanaan program kegiatan dan rekening belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
15.	23/11/2022	Biro Perekonomian	Konsultasi terkait pengelolaan BLUD
16.	16/05/2023	BPKAD Kab. Malang	Permohonan narasumber terkait pelaksanaan bimtek pengelolaan BMD
17.	31/05/2023	BPKAD Kota Probolinggo	Koordinasi awal pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan & barang milik daerah
18.	08/06/2023	BPKAD Kab. Jombang	Koordinasi awal pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
19.	13/06/2023	BPKAD Banyuwangi	Persiapan perubahan APBD 2023 & Koordinasi pelaksanaan pendampingan teknis PKD
20.	05/07/2023	Pemkab Situbondo	Survei awal untuk pelaksanaan bimtek keuangan/BLUD
21.	16/05/2023	BPKAD Kab. Malang	Permohonan narasumber terkait pelaksanaan bimtek pengelolaan BMD
22.	31/05/2023	BPKAD Kota Probolinggo	Koordinasi awal pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan & barang milik daerah

23.	08/06/2023	BPKAD Kab. Jombang	Koordinasi awal pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
24.	13/06/2023	BPKAD Banyuwangi	Persiapan perubahan APBD 2023 & Koordinasi pelaksanaan pendampingan teknis PKD

Sumber: Data Sekunder dari UPT PPK BPKAD Provinsi Jawa Timur

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pembatasan dan blokade fisik, sehingga memengaruhi kemampuan organisasi untuk melakukan transaksi tatap muka secara normal. Hal ini mendorong meluasnya penggunaan metode transaksi non-tunai, karena pembayaran tunai semakin tidak diminati untuk menghindari kontak fisik. Organisasi perlu segera mengadopsi solusi digital, seperti pembayaran online dan aplikasi dompet digital, agar tetap produktif. Pasca pandemi, tantangan berlanjut dengan kebutuhan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa konsultasi setelah pandemi didominasi dengan banyaknya pelaksanaan bimbingan maupun pendampingan. Ini sangat menjelaskan bahwa antara permasalahan saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 terlihat jelas. Permasalahan yang masuk dalam data konsultasi akuntansi pasca pandemi juga tidak terlalu kompleks. Beberapa hanya permasalahan permohonan yang tidak perlu dilakukan rapat besar untuk menentukan solusinya. Ini berarti pertanda yang baik, bahwa ada perubahan yang terjadi selama pasca pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam prosedur transaksi sehingga mendorong semakin meluasnya penggunaan transaksi non-tunai. Tantangan yang muncul selama dan setelah pandemi menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Organisasi harus terus berinvestasi dalam teknologi, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat, dan memahami perubahan prioritas masyarakat mengenai cara melakukan transaksi. Sehingga mereka dapat menjamin kesinambungan dan keberlanjutan dalam operasi yang efisien di era yang terus berubah ini.

Tantangan yang dihadapi mencakup ketidakmampuan melakukan transaksi secara fisik, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan meningkatnya ancaman dan pelanggaran keamanan siber. Organisasi harus memastikan bahwa transaksi non-tunai aman, efisien, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun pembatasan fisik secara perlahan mulai dilonggarkan, penting untuk diketahui bahwa pandemi ini telah membawa perubahan pada perilaku masyarakat mengenai preferensi perdagangan mereka (Mulyani et al., 2022). Akibatnya, ketergantungan terhadap transaksi non-tunai cenderung tetap tinggi dan mungkin menjadi standar baru dalam prosedur transaksi.

Kesimpulan

Perubahan yang tampak pada jenis permasalahan yang ada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 mampu memberikan kita gambaran bahwa saat awal pandemi terjadi di Indonesia, terjadi revolusi yang mendadak. Perubahan yang terlalu

cepat ini berkenaan dengan keuangan yang mana, setiap masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkontak fisik dengan orang asing. Dengan demikian, proses pembayaran atau pengelolaan keuangan berubah dan dampaknya adalah masyarakat tidak mudah beradaptasi. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami tentang metode pembayaran yang modern. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel permasalahan yang ditunjukkan saat pandemi Covid-19. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pandemi Covid-19 telah hilang dengan banyaknya permohonan pendampingan dan pertemuan sejenisnya. Sementara, tidak ada lagi permasalahan mengenai keuangan, terutama tata cara pembayaran atau pengelolaan. Ini adalah hal baik, karena menandakan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan waktu.

Daftar Pustaka

- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Kurniawati, R. O. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 861–868.
- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Mulyani, S., Ismail, M., & Rofiq, A. (2022). Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 melalui pengembangan sektor industri halal di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 167–180.
- Nursanti, F. (n.d.). *Efisiensi Dan Efektivitas Klinik Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*.
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): September DO - 10.32503/Jmk.V8i3.4145. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/4145>